



## RINGKASAN

SRI WIDIAWATI Penerapan Tujuh Kebijakan Relaksasi PBB Tahun 2020 di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Tengah (*Implementation of seven land and Building Tax relaxation policies at UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Tengah*). Dibimbing oleh AGUS CAHYANA

Mengingat tahun 2020 tepatnya awal Maret Indonesia menyatakan kasus pertama COVID-19 masuk ke Indonesia. Pernyataan tersebut membuat berbagai kebijakan diberlakukan pemerintah dalam upaya memutus rantai virus COVID-19, seperti pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dan berbagai kebijakan lain ditujukan agar tidak terjadi kerumunan. Hal tersebut membuat segala gerak-gerik manusia menjadi terbatas, para pedagang, tempat hiburan dan tempat wisata tidak bisa bebas melakukan kegiatan usahanya dan berdampak pada penghasilan mereka, dengan kondisi perekonomian masyarakat yang sedang buruk masyarakat tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Dengan kondisi masyarakat yang demikian dan pemerintah yang tetap harus memungut pajak, pemerintah memberikan keringanan pajak yaitu dengan pemberian insentif pajak. Berbeda dengan pemberian insentif pajak daerah lainnya untuk pajak PBB pemerintah Kota Bandung membuat kebijakan yaitu Tujuh Kebijakan Relaksasi PBB.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan bagaimana penerapan kebijakan relaksasi PBB dan bagaimana realisasi penerimaan PBB setelah ada kebijakan ini.

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat praktik kerja lapangan yaitu UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Bandung Tengah berada di Jalan Sukabumi Kacapiring Kecamatan Batununggal. Data yang diperoleh dengan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Berdasarkan pembahasan tujuh kebijakan relaksasi PBB yaitu berupa kebijakakan tidak ada kenaikan PBB tahunan 2020, penghapusan piutang PBB samapi tahun 2018, ketetapan Rp.100.000 rumah tinggal bebas PBB ,veteran atau pejuang kemerdekaan 100% bebas PBB, bayar PBB dengan Sampah, bayar PBB bisa di cicil, dan pengunduran jatuh tempo PBB menjadi 31 Oktober 2020. Dalam penerapannya kebijakan ketetapan Rp.100.000 rumah tinggal bebas PBB dilakukan dengan melihat data yang sudah ada sebelumnya. Pemberian cap lunas pbb tahun 2020 sebagai tanda menerima pembebasan dilakukan di kantor UPT PPD. Sedangkan penerapan pengurangan bagi veteran diajukan dengan berkas ke kantor UPT PPD. Meski pandemi dan kebijakan relaksasi PBB diberlakukan realisasi penerimaan UPT PPD Wilayah Bandung Tengah tahun 2020 mencapai targetnya.

Kata kunci : Kebijakan Relaksasi PBB, PBB, Realisasi Target Penerimaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.